

ISLAM NUSANTARA BERKEMAJUAN SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM DI INDONESIA

Nur Syam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: nursyamtuban2018@gmail.com

Nawawi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: nawawi356@gmail.com

Abstract: Islamic and political discourse in Indonesia has had a long experience. Since Indonesia's independence, the discourse on political Islam has become a fundamental conversation, especially at the beginning of independence. The conversation continued well in the New Order era and got strengthened in the era of bureaucratic reform. If in the New Order era, political Islam was strongly suppressed, so that it had almost no land to develop, then in the era of bureaucratic reform it became even stronger. The emergence of radical and extreme Islamic groups marked the growing strength of the Islamic era which carried the *khilāfab* movement. In the midst of this reality, moderate Islam emerged, which carried the theme of Nusantara Islam and Progressive Islam. Both of them were imaginatively contemplated by Nur Syam with the conception of Progressive Nusantara Islam projected to be a permanent solution to overcome the radical Islam in Indonesia.

Keywords: Moderate Islam; progressive Nusantara Islam; radical Islam.

Pendahuluan

Gagasan Islam Nusantara Berkemajuan merupakan “kontemplasi imajinatif” Nur Syam, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Republik Indonesia, sekaligus Guru Besar pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Sebagai mantan Sekjen Kemenag, Syam telah cukup banyak memahami apa sesungguhnya yang terjadi dalam

kehidupan umat beragama di Indonesia. Melalui gagasan tersebut, ia berupaya menyodorkan konsep moderasi beragama dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari NU, didapatkan konsep Islam yang toleran dan adaptif terhadap “dunia luar”, termasuk kearifan lokal. Sedangkan dari Muhammadiyah, didapatkan konsep Islam yang bisa bergandengan dengan kemajuan dunia modern. Artikel ini hendak meletakkan kedua konsep moderasi beragama tersebut ke dalam satu tarikan nafas, yaitu menyodorkan Islam moderat, yang ramah terhadap pernak-pernik kebhinnekaan, sekaligus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Sejak masa awal kemerdekaan, perdebatan dan kontestasi ideologi dan gerakan keislaman seakan menjadi sebuah diskusi yang tidak ada habisnya, diawali dengan konsep nasionalisme yang dimotori oleh Soekarno,¹ yang pada saat itu (Orde Lama) harus berhadapan dengan kekuatan politik Islam dalam konteks hubungan agama (Islam) dan negara, untuk membangun ideologi negara Indonesia.

Kontestasi antarggerakan ideologi keislaman tersebut pada faktanya memberikan warna pada sejarah panjang ideologi politik Islam di Indonesia pada masa-masa setelahnya. Pada masa Orde Lama, gerakan ideologi keislaman ini kemudian menunjukkan karakternya yang bisa dikatakan lebih condong pada ranah politik.

¹ Konsep nasionalisme Soekarno mendapat kritikan dari beberapa kelompok Islam, di mana tokohnya diwakili oleh Mohammad Natsir yang mengkhawatirkan kemungkinan paham nasionalisme Soekarno dapat berkembang menjadi sikap fanatisme buta (*‘asabiyah*) kepada tanah air. Untuk menghindari kekhawatiran ini, maka menurut Natsir, nasionalisme harus didasarkan pada niat yang suci yang bersifat ilahiah, yang melampaui hal-hal yang bersifat material. Maka dari itu, nasionalisme di Indonesia harus bercorak Islami, karena menurutnya, Islamlah yang akan membuka jalan medan politik kemerdekaan sebagai penanam awal bibit nasionalisme di Indonesia. Namun, Soekarno tampaknya juga mengkritik Natsir, di mana ia menegaskan bahwa nasionalisme yang ditawarkannya bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit tiruan dari Barat, atau berwatak Chauvinisme, melainkan nasionalisme yang berwatak toleran, bercorak ketimuran. Jadi, menurut Soekarno, konsep nasionalismenya bisa bekerjasama baik dengan kelompok Islam maupun Marxisme. Lihat dalam Tim ICCI, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 28. Bandingkan juga dalam Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 223.

Kelompok Darul Islam (DI) menjadi representasi gerakan ideologi politik Islam dengan tujuan utamanya yang ingin mendirikan negara Islam. DI mempunyai basis yang cukup kuat di banyak wilayah seperti Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Namun, gerakan ini akhirnya perlahan redup saat organisasi *mainstream* (NU, Muhammadiyah, dan Persis) memberikan penolakan terhadapnya, karena ia dianggap mempunyai agenda untuk mendirikan negara berbasis agama, yaitu Negara Islam Indonesia (NII).²

Sejarah perjalanan Islam di Indonesia sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari kontestasi antara Islam moderat yang di dalam realitas empiris diwakili oleh NU, dan Islam politik yang diwakili oleh Masyumi. Meskipun pada awalnya NU berada di dalam satu barisan, akan tetapi dalam rentang waktu berikutnya, NU memisahkan diri dari Masyumi dan berjuang untuk negara melalui wadah partai politik, Partai NU. Ketika di dalam Sidang Konstituante Masyumi menginginkan Islam sebagai dasar negara, sementara PNI menghendaki nasionalisme, dan PKI menginginkan dasar negara adalah komunisme, maka NU mendukung langkah Soekarno untuk mengembalikan dasar negara kepada Pancasila, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, kontestasi antara Islam politik dengan Islam moderat sejatinya sudah lama terjadi, hanya akumulasi dan tensinya saja yang berbeda-beda.

Artikel ini dimaksudkan untuk memahami latar sosial Islam moderat, berbasis pada pemikiran Syam, sebagaimana tertuang di dalam buku *Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Agama*, yang diterbitkan oleh Fatawa Publishing, Semarang, 2018.

² Sarekat Islam (SI) di bawah pimpinan HOS Tjokro Aminoto menjadi gerakan politik pemula yang menjalankan program politik nasional, yang mendapat dukungan dari masyarakat luas yang mampu menggelorkan semangat nasional menuntut pemerintahan sendiri rakyat Indonesia. Namun, gerakan SI ini tidak bisa bertahan lama, karena sejumlah aktivis SI tergoda untuk membelokkan kebijakan politik publik ke arah ideologi Islam, sehingga pada penghujung tahun 20-an, popularitas SI mengalami pasang-surut. Sekalipun tidak secara formal dinyatakan Islam sebagai ideologi, tetapi keinginan eksklusif sejumlah tokoh SI akan ideologi Islam turut menjadi salah satu sebab kemerosotan gerakan ini, di samping menyusupnya paham Marxisme ke dalam tubuh SI melalui aktivis politik partai beraliran kiri yang berada dalam Asosiasi Demokrasi Sosial. Penyusupan tersebut terjadi karena pertimbangan politik dukungan massa yang besar yang pada waktu itu dimiliki oleh SI. Maliki, *ibid.*, 27.

Kajian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*). Sebagai konsekuensi dari penggunaan metode ini, maka yang menjadi sumber data adalah dokumen-dokumen yang sah dalam bentuk buku, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, atau karya-karya yang diupload secara *online*. Data-data ini kemudian dikompilasikan sesuai dengan tema dan pokok bahasan yang sudah dirumuskan.

Sebagai sebuah kajian kepustakaan, maka semua karya tulis, baik buku, karya dalam jurnal, laporan penelitian, dan karya-karya lainnya diperlakukan sama dan memiliki bobot yang setara. Semua karya tulis tersebut kemudian dipaparkan sesuai dengan tema, subjudul, dan kategori-kategori pembahasan yang sudah dirumuskan. Misalnya, karya-karya tersebut dimasukkan dalam pembahasan tentang wajah Islam masa Orde Baru, wajah Islam era Reformasi, atau pembahasan mengenai Islam *wasatiyah* dan sebagainya, melalui analisis yang akurat, kemudian dipaparkan atau digambarkan dalam bentuk narasi yang mendukung terhadap tema, subtema, judul, subjudul, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan pembahasan dalam artikel ini.

Wajah Islam Masa Orde Baru

Periode selanjutnya, yakni masa Orde Baru (Orba), Indonesia mulai menerapkan sistem politik *corporatic* dan *bureaucratic authoritarian* memasuki sistem politik *pluralistic*.³ Sistem politik ini terbukti sangat efektif untuk menekan ideologi politik Islam; pada saat itu pemerintah tidak segan untuk mengambil langkah-langkah kooptasi dan bahkan represi. Dalam kondisi yang demikian, Islam politik hanya menghasilkan partai korporasi negara dan tidak mampu untuk menyuarakan kepentingan umat Islam di wilayah akar rumput.⁴

Walaupun demikian, sistem politik Islam pada paruh pertama masa Orba (1967-1985) masih menunjukkan tekanan-tekanan dan

³ Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 10, No. 2 (2002), 128.

⁴ Dalam sistem politik yang diterapkan Orba tersebut, tidak ada arena publik yang bisa digunakan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Ruang publik sepenuhnya dikendalikan oleh rezim yang berkuasa yang terdiri atas *triumvirate*, yaitu lembaga kepresidenan, militer, dan konglomerat. Dalam formasi politik seperti ini, yang terjadi adalah lembaga kepresidenan yang *powerfull* di satu pihak, dan munculnya kabinet yang tersubordinasi di pihak lain. Lihat Maliki, *Sosiologi Politik*, 267.

intimidasi yang digunakan oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok Islam secara general. Namun, kondisi yang demikian tidak menghalangi militansi kelompok Islam radikal yang faktanya masih saja muncul pada periode ini. DI yang bernaung di bawah kelompok Islamis-radikal muncul ke permukaan. Demikian pula, gerakan terselubung NII/TII (Negara Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia) yang pertama kali terbentuk pada tahun 1978 di Bandung kemudian tersebar ke beberapa kota dengan nama samaran 'Usrah', sebuah gerakan bawah tanah yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Bakar Ba'asyir.⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan ini dikenal dengan beberapa nama seperti Jamaah Islamiyah (JI) di Solo, "Generasi 554" di Jakarta, dan di Cirebon populer dengan "NII Cirebon".⁶

Pada periode selanjutnya (1986-1997), pemerintah Orba terlihat lebih melunak pada kelompok-kelompok Islam. Pada periode ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bagi sebagian kalangan dikatakan radikal. Pada dekade ini nampaknya pemerintah membiarkan ideologi Islam masuk ke ranah politik. Hal ini dapat ditengarai dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut pada kenyataannya ialah salah satu upaya Soeharto untuk mendapatkan dukungan politik umat Islam bersamaan dengan berkurangnya dukungan militer kepadanya.⁷

Namun demikian, upaya yang telah dilakukan oleh Soeharto tersebut tidak banyak membantu dalam melanggengkan jabatan presiden di tangannya. Akhirnya, Soeharto pun tumbang dari kursi kepresidenan dan Indonesia kemudian memasuki era baru yang

⁵ June Chandra Sentosa, "Modernization, Utopia and the Rise of Islamic Radicalism in Indonesia" (Tesis--Boston University, 1996), 353; Lihat juga dalam Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism", 129.

⁶ Gerakan Usrah ini menjadi tulang punggung dalam penyebaran pemikiran Islamis di kalangan generasi muda Muslim di beberapa kampus pada tahun 1980-an, dengan mengadakan *halaqah-halaqah* tentang ide-ide revolusioner kelompok Islamis, seperti ideologi yang dibangun oleh Ḥasan al-Bannā dan Sayyid Quṭb dari Ikhwanul Muslimin, Murtaḍā Muṭahharī, dan 'Alī Sharīfātī. Lihat dalam Sentosa, "Modernization, Utopia", 34.

⁷ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democracy in Indonesia* (Princeton NJ: Princeton University Press, 2000), 128. Bandingkan dengan Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability* (New South Wales: Allen & Unwin, 1999), 176.

biasa dikenal dengan sebutan era reformasi. Tidak lama setelah era baru ini, banyak bermunculan organisasi masyarakat berbasis agama, khususnya Islam, pun demikian halnya dengan partai politik berbasis Islam.⁸

Wajah Islam Era Reformasi

Setelah sekian lama roda pemerintahan Indonesia dijalankan dengan model otoritarianisme di bawah kendali Soeharto dengan kekuatan militernya, maka era reformasi menjadi babak baru yang membawa euforia keterbukaan (demokrasi) dalam setiap lini kehidupan. Berdasarkan kenyataan tersebut, Indonesia dapat dibidang masih sangat dini dalam hal berdemokrasi, dan oleh karenanya harus siap menghadapi banyak tantangan dalam setiap perjalanannya. Di antara tantangan tersebut adalah lahirnya kelompok-kelompok Islam, yang sebagian akademisi menyebutnya sebagai Islam fundamentalis, radikal, dan sebagainya, yang beberapa di antaranya secara terang-terangan menuntut penerapan shari'ah Islam. Namun, kelompok-kelompok tersebut pun tidak serta-merta seragam dalam memandang penerapan shari'ah Islam; di antara mereka ada yang hanya menuntut penerapan shari'ah tetapi masih menerima konsep negara-bangsa Indonesia, dan yang lainnya dengan tegas ingin menerapkan shari'ah sekaligus mengganti sistem negara menjadi negara Islam dengan sistem khilafah.⁹

⁸ Sebagaimana diketahui, bahwa dalam sejarah perpolitikan Indonesia pernah terjadi era multipartai, yakni pada Pemilu 1955, sebuah momen pesta demokrasi yang dianggap sebagai yang paling demokratis sepanjang karier demokratisasi di Indonesia, yang diikuti oleh 29 konstantan. Maliki, *Sosiologi Politik*, 271.

⁹ Istilah "Negara Islam" (*Islamic State* atau *al-Dawlah al-Islamiyah*) memantik perdebatan terutama menyangkut perwujudannya. Sebagian kalangan memaknai Negara Islam dalam pengertian sempit, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan shari'ah Islam (hukum-hukum Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadith, maupun dalam yurisprudensi Islam) yang dipimpin oleh seorang Khalifah atau Amir dalam sebuah sistem pemerintahan teokratik. Sebagian yang lain memahami Negara Islam secara lebih substantif: sejauh sebuah pemerintahan dijalankan secara demokratis, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kebijakan-kebijakannya diarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, maka pemerintahan tersebut bisa dianggap sebagai pemerintahan yang Islami, karena sesungguhnya ia telah menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Fathi Osman, *Islam in a Modern State: Democracy and the Concep of Shura* (t.t.: Georgetown University, 2001), 35. Dalam artikel ini, istilah Negara Islam dipakai dengan merujuk pada pengertian pertama.

Kelompok-kelompok Islam yang lahir karena perubahan lanskap politik pasca-Reformasi di antaranya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut kelompok-kelompok sejenis ini, yang lahir baik setelah maupun sebelum tumbanganya Orba, sebagai representasi *al-nafs al-lawwāmah* (jiwa yang ‘tegang’).¹⁰ Secara garis besar, kelompok ini berpandangan bahwa penerapan hukum shari‘ah adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam, dan tidak ada jalan lain kecuali menjadikannya sebagai hukum legal dalam sebuah negara. Mereka memahami bahwa meskipun hukum ini berlandaskan ajaran Islam, namun di dalamnya telah memuat pranata sosial terkait umat agama lain, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan hukum shari‘ah. Terlebih lagi, klaim sebagai umat mayoritas menjadikan mereka semakin lantang dalam menyuarakan pandangannya ini. Jika dilihat dari segi kuantitas, pada dasarnya kelompok-kelompok Muslim fundamentalis ini adalah kelompok minoritas, tetapi harus diakui bahwa, pada faktanya, mereka mampu memainkan peranan politik yang cukup berarti.

MMI merupakan organisasi yang terhitung masih muda. Ia didirikan di Yogyakarta sebagai hasil dari pertemuan kongres sejumlah aktivis Muslim pada Agustus tahun 2000. Tokoh kunci dari berdirinya organisasi ini adalah Irfan S. Awwas dan Abu Bakar Ba’asyir, yang pernah dituduh sebagai pimpinan spriritual JI, jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara. Salah satu motif pendirian organisasi ini adalah kekecewaan yang dirasakan oleh Ba’asyir terhadap pengikut JI.¹¹ Salah satu produk dari konferensi saat pendirian MMI adalah cita-cita tegaknya shari‘ah Islam, khususnya di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam apa yang disebut *Piagam Yogyakarta*.¹²

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa selain MMI, HTI juga merupakan salah satu organisasi keislaman yang lahir pasca-

¹⁰ Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 98.

¹¹ Anwar Kurniawan dan Ahmad Aminuddin, “Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Tafsir Ayat-ayat Penegakan Syariat Islam di Indonesia”, *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1 (2018), 126.

¹² Muhammad Thalib et al., *Panduan Daurah Syar’iyyah: Untuk Penegakan Syariah Islam* (Yogyakarta: Majelis Mujahidin Pusat, 2010), iv.

kejatuhan Orba. Kelompok ini merupakan bagian dari organisasi transnasional Hizbut Tahrir (HT),¹³ yang didirikan pada tahun 1953 oleh Taqī al-Dīn al-Nabhānī. Sesungguhnya, embrio dari organisasi HTI, menurut Syamsul Arifin, telah ada sejak Orba. Namun, karena kebijakan Orba saat itu yang represif terhadap gerakan kelompok agama, maka HTI lebih memilih untuk tidak mendeklarasikan dirinya. Para anggotanya lebih memilih untuk menjalankan organisasi ini sebagai organisasi *underground* untuk menghindari tekanan rezim Orba. Setelah rezim Orba tumbang, para aktivis ini kemudian memanfaatkan momen tersebut dengan mendeklarasikan HTI sebagai organisasi keislaman kepada publik. Salah satu tujuannya adalah tentu untuk memperluas gerakannya dan melakukan perekrutan anggota baru yang bisa menjadi martir dalam jihad mereka. Terbukti, strategi ini kemudian mampu membuat HTI memiliki *trend* yang positif terutama dalam hal perkembangan basis massanya.¹⁴

Dua organisasi di atas mempunyai persamaan paradigma dan *goal* yang diperjuangkan, yakni cita-cita tegaknya shari'ah Islam secara *kāffah*. Namun demikian, HTI dan MMI memiliki pandangan berbeda dalam metode perjuangannya. Meski seringkali mengecam sistem sekuler, MMI masih dapat menerima bahwa shari'ah Islam bisa diterapkan di Indonesia—tanpa perlu mengganti sistem yang telah ada—dengan mengakomodir bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, sekalipun menganggap demokrasi sebagai sistem *kufr*, MMI masih mengakomodir sistem demokrasi di Indonesia dengan segenap lembaga-lembaga tinggi negaranya, seperti MPR, DPR, Presiden, dan lain-lain. Tidak demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh HTI. Organisasi kedua ini berpandangan bahwa satu-satunya cara untuk menerapkan shari'ah Islam secara *kāffah* tiada lain adalah melalui penegakan *Khilafah Islamiyah*.

Bercermin dari pergumulan fundamentalisme Islam yang centang perenang di atas, kajian fundamentalisme Islam di

¹³ Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 183.

¹⁴ Syamsul Arifin, "Multikulturalisme dalam Skema Deradikalisasi Paham dan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia", dalam Muhammad Zain et al. (eds.), *Proceeding AICIS XIV: Islamic Jurisprudence in Resolving Contemporary Problems* (Jakarta: DIKTIS & STAIN Samarinda, 2014), 3; Lihat pula Masykuri Abdillah, "Meneguhkan Moderasi Beragama", *Kompas*, 9 Februari 2015.

Indonesia menjadi sangat urgen ketika diletakkan dalam konteks respons gerakan-gerakan tersebut terhadap ideologi modernisme Islam, baik dalam penggunaan konstitusi negara, maupun ranah sosial-keagamaan. Dalam konteks ini, para pendukung fundamentalisme mencoba melawan tekanan-tekanan represif yang mengancam sumber-sumber eksistensi Islam, baik dalam dinamika sosial-politik, budaya, maupun keagamaan. Pada akhirnya, mereka ingin melakukan perubahan yang radikal atas nama “agenda suci”.¹⁵

Berbeda dengan MMI dan HTI yang lahir segera setelah reformasi, FPI adalah kelompok Muslim radikal¹⁶ yang lahir sebelum itu, tepatnya menjelang runtuhnya Orba. Peranan FPI sampai sekarang cukup signifikan, terutama pada lanskap politik Indonesia, sebagai organisasi keislaman yang sangat aktif dan punya pengaruh yang cukup besar dibanding kelompok Islamis lainnya. Secara kultur dan ideologi, pada dasarnya, FPI sama halnya seperti organisasi NU yang menganut ideologi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Aswaja). Namun, bagi FPI, mengikuti jejak kaum *salaf al-sālih* (*Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*) harus dilakukan secara total tanpa *reserve*.¹⁷ Dengan berpijak pada pemahaman keagamaan yang demikian, khususnya pada jargon “amar makruf nahi mungkar”, maka tidak heran jika organisasi ini seringkali melakukan aksi premanisme (*vigilante*) terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggap sebagai pelaku dosa (*sinner*), dan berusaha melenyapkan perilaku yang dilarang agama (*deviant group*), seperti prostitusi dan jual-beli minuman keras.¹⁸

Orientasi ideologi keislaman di Indonesia yang bersifat radikal ini lebih kental mengarah pada penerapan shari'ah pada tingkat masyarakat ketimbang pada level negara. Pada level ini, FPI dan MMI mempunyai kesamaan ideologi dan arah gerakan yang mana

¹⁵ Gerakan ini melibatkan diri dalam berbagai organisasi radikal dan melakukan sejumlah kekerasan, seperti peledakan BCA di Jakarta (1984), Candi Borobudur (1985), peledakan bom di Bali (2002), bom JW. Marriott (2003), maupun peledakan di sejumlah gereja di Indonesia.

¹⁶ Sidney Jones et al., *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia* (Jakarta: PUSAD-Paramadina, 2015).

¹⁷ Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 90-94.

¹⁸ Azyumardi Azra, “Introduction: The State and Shari'ah in the Perspective of Indonesia Legal Politics”, dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003), 2.

mereka tidak serta merta menolak konsep negara dengan sistem demokrasi. Namun, FPI bisa dikatakan organisasi dengan ideologi politik Islam yang lebih longgar jika dibandingkan dengan MMI, terlebih lagi HTI, karena FPI secara terang-terangan justru menerima demokrasi, bahkan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara.

FPI menegaskan bahwa Pancasila selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, mekipun di kesempatan yang lain mereka menuntut penerapan hukum shari'ah di Indonesia setidaknya berdasarkan dua alasan mayor: *Pertama*, umat Islam adalah warga mayoritas, maka mereka mempunyai hak yang lebih besar untuk menjalankan ajaran agamanya secara *kaffah*, termasuk dalam hal penerapan hukum shari'ah; *Kedua*, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Pancasila dan sistem demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan justru keduanya berjalan beriringan, di mana banyak nilai-nilai keislaman yang telah terakomodir di dalam praktik demokrasi, sehingga penerapan hukum shari'ah di Indonesia justru akan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang makmur (*baladab tayyibah wa rabb ghafur*).¹⁹

Kungkungan Radikalisme, Fundamentalisme, dan Terorisme

Walaupun bukan cerminan dari mayoritas pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam di Indonesia, radikalisme yang diusung sebagian umat itu memberikan warna tersendiri bagi perjalanan wajah Islam di Indonesia.²⁰ Untuk menyebut contoh, taruhlah kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur pada 19 Mei 2018, di mana mereka diserang oleh massa sebanyak tiga kali dalam satu hari. Penyerangan ini mengakibatkan sembilan rumah rusak, empat sepeda motor hancur, dan sebanyak 24 orang harus dievakuasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyerangan ini bermotif paham keagamaan. Sebagaimana banyak diberitakan bahwa Ahmadiyah merupakan sempalan dari Islam, yang oleh sebagian pemeluk agama Islam sendiri dianggap telah

¹⁹ Muhammad Rizieq b. Husein Syihab, *Dialog Amar Ma'ruf Nabi Munkar: Menjawab Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2004), 10.

²⁰ Dinamika gesekan kehidupan beragama digambarkan dengan baik dalam Nur Syam, *Demi Agama, Nusa, dan Bangsa: Memaknai Agama, Kerukunan Umat Beragama, Pendidikan, dan Wawasan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2018), 94.

tidak Islam lagi, yang tampaknya hal tersebut kemudian memicu banyak terjadinya kekerasan terhadap para jamaahnya. Tidak hanya itu, di sepanjang tahun 2018, peristiwa kekerasan, intimidasi, persekusi berdimensi agama di Indonesia begitu marak.²¹

Di samping itu, era reformasi juga memberikan angin segar bagi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Banyak orang mengira, dengan terbunuhnya Noordin M. Top dan tertangkapnya beberapa teroris di Aceh, aksi terorisme telah mati. Namun, ternyata anggapan itu meleset. Ibarat sel-sel yang sudah dibangun dan dikembangkan dengan rapi, maka mati satu bisa tumbuh seribu; satu orang tertangkap maka generasi penggantinya sudah disiapkan. Dengan struktur dan militansi yang mereka buat, mereka dengan mudah bermutasi secara vertikal. Bahkan, mereka telah berhasil menanamkan ajaran jihad ofensif kepada para anggotanya, hingga mereka rela menjadi “*penganten*” bom bunuh diri demi keyakinannya. Keadaan ini bermula dari adanya prinsip yang mereka pegang yang memandang Indonesia sebagai *dār al-harb* yang harus diperangi.²²

Kelompok-kelompok yang disebut di atas itu sejatinya sudah masuk ke dalam berbagai jaringan di Indonesia, seperti jaringan politik, sosial, dan ekonomi. Di dalam jaringan politik, mereka telah masuk ke dalam partai politik, parlemen hingga birokrasi. Di dalam jaringan sosial, mereka telah masuk ke dalam berbagai lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan. Sementara di dalam jaringan ekonomi, mereka telah masuk ke dalam unit-unit usaha yang melembaga. Semua ini menandakan bahwa jaringan Islam radikal telah menjadi bagian dari Indonesia.²³

Islam Nusantara Berkemajuan sebagai Model Berislam Secara Moderat

Melihat wajah Islam akhir-akhir ini yang sangat memprihatinkan seperti yang telah dibicarakan di atas, NU dan Muhammadiyah yang konsisten dengan Islam keindonesiaan terpanggil untuk ikut menghalau meluasnya praktik dan pemahaman keagamaan yang radikal, fundamentalis, dan semacamnya. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keislaman *mainstream* di Indonesia kemudian

²¹ <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m>.

²² Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai; Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan*. (Jakarta: Kencana, 2018), 114-115.

²³ Ibid.

secara masif mengampanyekan model berislam secara moderat. Hal tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh fenomena semakin banyaknya masyarakat Muslim Indonesia yang terpengaruh paham radikal, yang dipandang dapat mengganggu keharmonisan antarwarga negara, mengingat mereka yang sudah terpengaruh dengan paham radikalisme cenderung memperlihatkan wajah Islam yang ‘marah’ dari pada ‘ramah’. Selain itu, kelompok-kelompok radikal merasa bahwa hanya kelompok mereka saja yang benar, bahkan kemudian melakukan klaim atas nama Islam secara general. Konsekuensinya, kelompok lain dianggap sebagai salah, bahkan tidak jarang dituduh sesat. Keadaan tersebut pada akhirnya memicu timbulnya konflik sosial di masyarakat, karena mereka juga tidak segan melakukan tindakan represif terhadap kelompok lain yang dianggap salah atau sesat. Tentu, hal yang demikian juga berpengaruh pada citra Islam di mata dunia, sehingga NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk semakin gencar mengampanyekan apa yang disebut Islam *wasatīyah* (moderat).

Meskipun NU dan Muhammadiyah mengusung konsep moderasi beragama, tetapi masing-masing mempunyai ciri khas dalam konsep yang ditawarkan, termasuk dalam hal pengistilahan (label). NU menawarkan konsep “Islam Nusantara”, yang secara singkat bisa dipahami sebagai model sebagaimana telah diajarkan oleh para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah* terdahulu (*salaf al-s}ālih*) dan mengakomodir praktik-praktik tradisi lokal Nusantara tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan Muhammadiyah menawarkan konsep “Islam Berkemajuan”, yang mengandaikan bahwa beragama Islam bukan berarti menjadikan seseorang terperangkap dalam kejumudan. Islam Berkemajuan juga mengedepankan sikap moderat dan tidak anti terhadap modernisme. Bahkan, konsep ini justru memandang modernisme harus dibarengi dengan nilai-nilai keislaman sehingga masyarakat Muslim tidak tercerabut dari ajaran agama Islam.

Pasca-Muktamar NU ke-33 yang berlangsung di Jombang pada 1-5 Agustus 2015, Islam Nusantara menjadi idiom yang cukup populer di telinga masyarakat, khususnya umat Muslim Indonesia. Islam Nusantara yang pada saat itu awalnya hanya merupakan tema Muktamar, kini semakin dikenal luas, baik di pedesaan maupun perkotaan, sebagai harapan baru. Term tersebut pada perkembangannya bertransformasi menjadi sebuah konsep cara

beragama dengan mengedepankan sikap *wasatīyah*. Tema utama tersebut diusung sebagai wujud respon para ulama terhadap citra Islam yang tampak semakin memburuk di kancah internasional. Kemerosotan tersebut tidak lain disebabkan banyaknya kasus kekerasan yang mengatasnamakan Islam, seperti pengeboman, penculikan, bahkan pembunuhan dan peperangan.

Islam Nusantara sendiri dapat didefinisikan sebagai amaliah Islam di Nusantara yang merupakan hasil dialog dengan kearifan lokal; di samping tetap memertahankan nilai-nilai shari'ah, ia juga mengakomodir cita rasa budaya dan realitas setempat. Pemaknaan lain dari Islam Nusantara adalah Islam yang mencirikan Indonesia dan atau Nusantara dengan berbagai macam tradisi dan adat istiadat yang mampu bersanding dengan norma-norma Islam.²⁴ Dengan kata lain, Islam Nusantara di sini merupakan model pemahaman, pemikiran, dan pengamalan shari'ah Islam dengan berafiliasi pada tradisi maupun budaya yang berkembang di Asia Tenggara.

Dalam perkembangannya, Islam tidak hanya diterima baik oleh masyarakat Nusantara, tetapi juga turut mewarnai keragaman budaya Nusantara dan menjadikannya *rahmah li al-'ālamīn*. *Rahmah li al-'ālamīn* sendiri merupakan idiom yang menjadi tujuan serta karakteristik Islam Nusantara yang meliputi penghargaan terhadap perbedaan, toleran, cinta damai, dan moderat; Islam yang memahamkan bukan memaksa; Islam yang menyerukan taubat bukan menghujat; Islam yang merangkul bukan memukul; Islam yang selalu membina bukan mudah menghina. Dengan kata lain, Islam Nusantara adalah representasi Islam moderat yang pada praktiknya mampu bertahan dan mempertahankan diri di berbagai tantangan zaman.

Ketika Mukhtamar NU mengangkat tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia”, sementara Mukhtamar Muhammadiyah membawa tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”, kedua ormas yang kerap dianggap representasi mayoritas Muslim Indonesia ini sejatinya telah menawarkan konsep Islam tersendiri. NU

²⁴ Mujamil Qomar, “Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam”, *el-Harakah: Jurnal Budaya Islam*, Vol. 17, No. 2 (2015), 198-217.

menyuguhkan “Islam Nusantara”, sedangkan Muhammadiyah menawarkan “Islam Berkemajuan”.

Dalam hal ini, Din Syamsuddin menyatakan, Islam memiliki watak universal, yang harus senantiasa dikuatkan, tanpa harus meninggalkan yang partikuler atau lokalitas. Hal ini harus diberdayakan dengan visi berkemajuan. Visi berkemajuan yang dimaksud harus diterjemahkan dalam berbagai sektor, dengan proses manajemen yang modern dan baik, karena hal inilah yang bisa memajukan Indonesia. Islam Berkemajuan berjalan beriringan dengan konsep negara Indonesia, yang mencitakan “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa”.²⁵

Islam Berkemajuan (*din al-ḥaḍārah*) dalam pandangan Muhammadiyah, menurut keterangan Haedar Nashir, adalah Islam yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk membangun peradaban yang utama dan menjadi rahmat bagi semesta. Nabi Muḥammad bersama kaum Muslimin selama 23 tahun telah menjadikan Yathrib yang pedesaan menjadi *al-Madīnah al-Munawwarah*, kota peradaban yang cerah dan mencerahkan. Setelah itu, selama sekitar lima sampai enam abad, Islam menjadi peradaban yang maju di pentas dunia.

Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba-utama, yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Kemajuan dalam pandangan Islam bersifat multiaspek, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam seluruh dimensi kehidupan, yang melahirkan peradaban utama sebagai bentuk peradaban alternatif yang unggul secara lahiriah dan ruhaniah. Adapun dakwah Islam sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan diproyeksikan sebagai jalan perubahan (transformasi) ke arah terciptanya kemajuan, kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan sekat-sekat sosial lainnya. Islam *rahmah li al-‘ālamīn* harus berkemajuan. Islam berkemajuan ingin mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan melalui transformasi sosial yang bersifat emansipatoris, humanis, liberal, dan transenden.

Islam moderat di Indonesia tidak mungkin menjadi kekuatan yang berdaya saing tinggi dan dapat mempengaruhi kehidupan

²⁵ Din Syamsuddin, “Isi Gagasan Islam Berkemajuan Muhammadiyah”, *Republika*, 27 Jumādā al-Akhīr 1440/04 Maret 2019.

kebangsaan dan kemanusiaan universal abad ke-21, jika dirinya lemah dan tidak maju. Islam moderat dalam dinamika mutakhir Indonesia akan berhadapan dengan beragam paham dan realitas kehidupan yang kompleks. Proses globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan sosial, dan modernisasi abad ke-21 akan memberi pengaruh terhadap karakter umat beragama apapun dan di manapun, termasuk di dalamnya umat Islam. Demikian pula Islam moderat kini dituntut untuk menghadapi berbagai paham Islam, baik yang cenderung radikal dan konservatif, maupun liberal dan sekuler. Dalam konteks tersebut, Islam moderat saja tentu tidaklah cukup. Islam Indonesia dewasa ini, di samping memiliki wajah yang moderat, ia juga memerlukan wajah yang berkemajuan.

Wajah Islam Indonesia hari ini dan ke depan memerlukan kesinambungan, selain tetap mempertahankan karakternya yang moderat, juga harus memiliki karakter berkemajuannya, agar mampu berkompetisi dengan umat dan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia baru di abad modern yang sangat dinamis dan kompleks. Islam tengahan (*wasatiyyah*) yang berwajah lembut, damai, teduh, toleran, dan harmonis, harus berintegrasi dengan Islam berkemajuan yang menampilkan kesadaran rasionalitas, obyektivitas, ilmu pengetahuan, teknologi, kerja keras, disiplin, mandiri, profesionalitas, dan nilai-nilai kemajuan lainnya, sehingga umat Islam yang mayoritas ini hadir sebagai kekuatan yang benar-benar unggul.²⁶

Sejak awal, Islam Indonesia adalah Islam yang bercirikan moderat dan ramah kepada siapa pun dengan landasan filosofis dan ideologis,²⁷ yaitu salah satu tipologi Islam yang lahir sebagai penengah, serta penjaga keseimbangan dari kecenderungan-kecenderungan Islam liberal maupun radikal. Di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menjadi simbol nyata dari Islam yang ramah, toleran, inklusif, konstruktif, dan moderat. Toleransi dan moderasi adalah ciri utama dari kedua ormas terbesar di Indonesia tersebut. NU dan Muhammadiyah juga berperan sebagai penjaga moderasi

²⁶ Haedar Nashir, "Muhammadiyah dan Kehadiran Islam Berkemajuan di Indonesia", 16 Februari 2018, <http://www.m.muhammadiyah.or.id/id.news-13248-detail-muhammadiyah-dan-kehadiran-islam-berkemajuan-di-indonesia.html>, diakses tanggal 2 Maret 2019.

²⁷ Qomar, "Islam Nusantara", 209.

Islam sekaligus ikon Islam Nusantara. Keduanya merupakan kelompok *mainstream* Islam yang selalu menyerukan keramahan, kedamaian, dan persatuan di tengah perbedaan yang ada; Islam yang mengajarkan untuk selalu menjaga perdamaian melalui toleransi dan moderasi.²⁸

Sampai di sini, dapat ditarik benang merah bahwa Islam Nusantara merupakan identitas Islam yang dilihat dalam perspektif kawasannya, yang dapat pula disejajarkan dengan Islam Turki, Islam India, Islam Arab, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Islam Nusantara dapat dipahami sebagai model pemahaman, pemikiran, dan pengamalan shari'ah Islam melalui pendekatan kultural; Islam Nusantara juga mencerminkan Islam yang toleran, moderat, cinta damai, inklusif, menyejukkan, mengayomi serta menghargai keberagaman, dan keberadaannya bisa disebut sebagai antitesis terhadap tindakan radikalisme Islam yang merusak citra Islam itu sendiri; Islam Nusantara merupakan tipologi Islam yang menjaga *ukhūwah* kebangsaan; Islam Nusantara bersandar pada prinsip *tasāmuh* (toleran), dan mengedepankan akhlak serta menjunjung nilai etis dan agama.

Tema besar “Islam Nusantara Berkemajuan” sangat terkait dengan visi Kemenag dalam mengembangkan gerakan moderasi beragama. Moderasi beragama telah menjadi semacam ‘ruh’ *moral virtue* yang menjiwai berbagai kegiatan di semua satuan kerja di lingkungan Kemenag. Jika Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan konsep ‘deradikalisasi’ yang cenderung defensif, yakni menysar mereka yang sudah terpapar ide radikalisme, maka melalui moderasi beragama, Kemenag mengajak semua komponen masyarakat untuk secara aktif melakukan gerakan untuk kembali kepada *khittab* dalam beragama, yakni selalu bersikap moderat, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem di dalam salah satu sisi penafsiran. Moderat yang di dalam bahasa Arab berarti *wasatīyah*, sangat erat kaitannya dengan bersikap adil (*‘adl*), berimbang (*tawāzūn*) atau tidak berat sebelah. Sikap moderat dalam beragama tidak akan pernah dimiliki oleh seseorang jika ia tidak bisa bersikap adil dan tidak mencoba berdiri di tengah-tengah di antara tafsir kebenaran orang lain. Lawan dari

²⁸ Kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap isu-isu aktual, misalnya isu Islam, NKRI dan Pancasila, HAM, dan khilafah, tergambar baik dalam Syam, *Islam Nusantara Berkemajuan*, 24-53

kata ini alah *taḡarruf*, yang berarti berlebihan, bersikap ekstrem, radikal atau eksekif.

Konsep *tawassuṭ* dalam Islam berarti ajakan untuk selalu memilih jalan tengah; mengayuh di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri; di antara literalisme dan liberalisme. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, lebih-lebih di tengah masyarakat yang sangat plural dan multikultural seperti Indonesia saat ini, signifikansi moderasi beragama semakin menemukan mementumnya. Keberadaan prinsip *tawāzun* dan *tawassuṭ* niscaya akan melahirkan pemahaman dan praktik *tasāmuh* atau sikap toleran yang sangat diperlukan untuk tegaknya tatanan kehidupan masyarakat majemuk yang rukun dan damai. Pendekatan moderasi beragama mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir dan bertindak secara bijak, tidak bersikap ekstrem, tidak fanatik, atau terobsesi oleh satu tafsir keagamaan atau pandangan seseorang dan kelompok tertentu saja, dengan menutup mata pada kehadiran tafsir keagamaan dan pandangan lainnya yang berbeda.

Term Islam Nusantara Berkemajuan tersebut tidak lantas merujuk pada sebuah varian Islam yang baru. Secara normatif, Islam diyakini satu dan bersifat universal, tidak berbeda dengan Islam yang berkembang di manapun, yakni yang secara akidah mengajarkan kesaksian iman kepada Allah dan kepada Nabi Muḡammad. Lebih lanjut, Islam Nusantara Berkemajuan harus dipahami dalam konteks pengalaman empirik Islam dalam lokus Nusantara yang telah mengalami penerjemahan, sebagai hasil interaksi dan kontekstualisasi dengan realitas sosial, budaya, dan agama di wilayah ini. Islam Nusantara Berkemajuan harus dipahami sebagai Islam yang telah berkembang ditempa kemajuan zaman dan hidup damai di bumi Nusantara.²⁹

Sementara itu, prinsip Islam Berkemajuan yang lebih diwakili dan menjadi ciri khas Muhammadiyah, tercermin pada fokus pengelolaan organisasi ini pada tiga aspek pelayanan bagi masyarakat Muslim Indonesia, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.³⁰ Untuk menyebut contoh keberhasilan Muhammadiyah, taruhlah penyeragaman dalam nomenklatur pendidikan di lingkungan Muhammadiyah yang tentunya juga

²⁹ Lukman Hakim Saifuddin, "Kata Pengantar Menteri Agama Republik Indonesia", dalam *ibid.*, ix-xiii.

³⁰ *Ibid.*, 15.

berimplikasi pada keseragaman kebijakan yang dikelola oleh organisasi. Dalam kondisi demikian, pada faktanya, Muhammadiyah mampu melahirkan banyak kaum terpelajar dan cendekiawan Muslim yang kemudian mampu memberikan kontribusi pada bangsa Indonesia.

Selain itu, Islam Nusantara Berkemajuan yang saat ini juga menjadi visi dan misi Kemenag Republik Indonesia tidak lain adalah upaya memfusiikan Islam Tradisionalis dan Islam Modernis, dalam hal ini 'Islam' NU dan Muhammadiyah dengan segala keunikan yang dimiliki. Adapun salah satu *goal* utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antarumat beragama di NKRI.

Penutup

Islam di bawah NU dan Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap praktik dan pemahaman keagamaan di Indonesia. NU dengan gagasan Islam Nusantara-nya, dan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan-nya, mampu menyuguhkan praktik dan pemahaman keagamaan yang ramah terhadap antarsesama, akomodatif terhadap kearifan lokal, dan kooperatif dengan keberadaan negara. NU berhasil dengan baik membawa umatnya memahami relasi Islam, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, sementara Muhammadiyah berhasil membawa umatnya meletakkan Islam bersanding secara elegan dengan kemajuan zaman.

Akhirnya, Islam Nusantara Berkemajuan adalah Islam yang mampu memainkan peran yang ramah terhadap percaturan politik baik nasional ataupun internasional, peka terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) kontemporer, gender, khilafah, dan menjadi kontra wacana terhadap radikalisme, fundamentalisme, ataupun terorisme.

Daftar Rujukan

- Abdillah, Masykuri. "Meneguhkan Moderasi Beragama", *Kompas*, 9 Februari 2015.
- Arifin, Syamsul. "Multikulturalisme dalam Skema Deradikalisasi Paham dan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia", dalam Muhammad Zain et al. (eds.), *Proceeding AICIS XIV: Islamic Jurisprudence in Resolving Contemporary Problems*. Jakarta: DIKTIS & STAIN Samarinda, 2014.

- Azra, Azyumardi. "Introduction: The State and Shari'ah in the Perspective of Indonesia Legal Politics", dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton NJ: Princeton University Press, 2000.
- Hilmy, Masdar. *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m>
- <https://nasional.kompas.com.cdn.ampproject.org>
- <https://news.detik.com/x/detail/investigasi>.
- Jones, Sidney et al. *Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia*. Jakarta: PUSAD-Paramadina, 2015.
- Kurniawan, Anwar, dan Ahmad Aminuddin. "Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Tafsir Ayat-ayat Penegakan Syariat Islam di Indonesia", *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1, 2018.
- Maliki, Zainuddin. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Nashir, Haedar. "Muhammadiyah dan Kehadiran Islam Berkemajuan di Indonesia", 16 Februari 2018, <http://www.m.muhammadiyah.or.id/id.news-13248-detail-muhammadiyah-dan-kehadiran-islam-berkemajuan-di-indonesia.html>, diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Ng., Al-Zastrow. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Osman, Fathi. *Islam in a Modern State: Democracy and the Concept of Shura*. t.t.: Georgetown University, 2001.
- Qomar, Mujamil. "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam", *el-Harakah: Jurnal Budaya Islam*, Vol. 17, No. 2, 2015.
- Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability*. New South Wales: Allen & Unwin, 1999.
- Sentosa, June Chandra. "Modernization, Utopia and the Rise of Islamic Radicalism in Indonesia". Tesis--Boston University, 1996.
- Syam, Nur. *Islam Nusantara Berkemajuan: Tantangan dan Upaya Moderasi Agama*. Semarang: Fatawa Publishing, 2018.

- . *Demi Agama, Nusa, dan Bangsa; Memaknai Agama, Kerukunan Umat Baragama, Pendidikan, dan Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2018.
- . *Menjaga Harmoni Menuai Damai; Islam, Pendidikan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Thalib, Muhammad et al. *Panduan Daurah Syar'iyah: Untuk Penegakan Syariah Islam*. Yogyakarta: Majelis Mujahidin Pusat, 2010.
- Van Bruinessen, Martin. "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 10, No. 2, 2002.
- Wahid, Abdurrahman (ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.